

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011-2015

Yohanes P. Kumagaya¹, Yessikha Herminia Maysita²

Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras, Bandar Lampung

Email: yohaneskumagaya@gmail.com

ABSTRACT

Local original income is an income that has an important role for the stability of development of a region starting from the economy, the infrastructure, the provision of services to the community and others. In financing local household affairs, local governments should be able to maximize sources of local revenue, one of the most important is derived from local taxes. This research is a replication and development of research conducted by Isfatul Fauziah et al. In 2014 with the object of research in the Office of Revenue Management of Finance and Assets District of Malang. The aim of this study is to determine the level of effectiveness and the level of contribution of each type of local tax on local original income in the city of Bandar Lampung.

From the analysis, it is known that in the period of five years the type of tax which has highest income effectiveness rate is derived from non-metal mineral and rock taxes of 124.17%. As for the lowest level of effectiveness of revenue comes from parking taxes with a percentage of 47.2%. While the contribution of local tax to the highest revenue of the region is from street lighting tax with percentage of 18.36% and the lowest contribution comes from non metallic mineral and rock taxes with percentage of 0.24%.

Keywords : Local Taxes Effectiveness, Local Taxes Contribution , Local Original Income

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dengan adanya desentralisasi juga, pemerintah daerah dapat dengan maksimal mengoptimalkan penerimaan guna membiayai urusan rumah tangga daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat potensial adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah dimana penerimaannya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Mahmudi (2009), semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya menjadi perhatian pihak eksekutif, namun legislatif pun berkepentingan sebab besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi struktur gaji anggota dewan.

Data Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung tahun 2016 menyebutkan beberapa aspek pembangunan daerah khususnya ekonomi telah mengalami peningkatan misalnya pada sektor air minum, nilai air minum yang didistribusikan PDAM 'Way Rilau' mengalami peningkatan di Tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kemudian di sektor perdagangan jumlah kunjungan kapal untuk pelayaran luar negeri dan dalam negeri yang melalui Pelabuhan Panjang mengalami kenaikan di tahun 2015, hal ini berdampak pada naiknya volume muatan tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel dibawah, dapat dilihat bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung menaikkan jumlah target pendapatan atas pajak daerah untuk setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat optimis dalam penerimaan pendapatan pajak daerah mengingat banyaknya jenis pajak yang dapat dioptimalkan.

Tabel 1.
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015

Tahun (Years)	Target (Target) Rp	Realisasi (Realization) Rp	Persentase (Percentage) %
2011	104.234.442.000	112.557.355.470	107,98
2012	183.315.622.192	183.436.575.291	100,07
2013	271.516.090.306	242.651.752.332	89,37
2014	290.419.360.000	246.167.925.213	84,76
2015	443.719.360.000	258.454.662.346	58,25

Sumber: BPS Lampung, data diolah (2016)

Dan angka realisasi yang ditunjukkan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Akan tetapi bila dilihat berdasarkan jumlah target yang telah ditetapkan setiap tahunnya, realisasi yang tercapai hanya terjadi pada tahun 2011 dan 2012 sedangkan untuk tahun 2013 hingga 2015 mengalami penurunan angka realisasi yang cukup signifikan yaitu untuk tahun 2013 dengan angka persentase 89,37%, tahun 2014 dengan angka persentase sebesar 84,76% dan tahun 2015 angka persentase yang diperoleh sebesar 58,25%.

Penurunan realisasi yang terjadi pada tahun-tahun tersebut menjadi evaluasi tersendiri bagi pihak pemerintah bagaimana mengatasi hal tersebut yang seharusnya dapat diperoleh dengan maksimal. Peraturan daerah tentang pajak, sistem pemungutan pajak dan tata cara pemungutan pajak menjadi salah satu poin penting yang perlu disosialisasikan dalam meminimalisir menurunnya penerimaan pajak daerah.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana tingkat efektifitas penerimaan Pajak Daerah berdasarkan jenis-jenisnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015

2. Mengetahui bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian

Dalam Mardiasmo (2004), Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam Azhari (2015) mengenai pajak daerah, paling tidak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat, 2) sederhana, 3) jenisnya tidak terlalu banyak, 4) lapangan pajaknya tidak melampaui/mencampuri pajak pusat, 5) berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut, 6) biaya administrasinya rendah, 7) beban pajak relatif seimbang, 8) dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional.

1. Pajak Daerah

luran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi dikelompokkan dalam retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari: a) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, b) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, c) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup: a) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, c) jasa giro, d) bunga deposito, e) penerimaan atas tuntutan ganti rugi, f) penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, g) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, h) pendapatan denda pajak dan denda retribusi, i) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, j) pendapatan dari pengembalian, k) fasilitas sosial dan fasilitas umum, l) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, m) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Perpajakan

Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penggolongan pajak

berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 yaitu, Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Manfaat Pajak

Pajak Daerah

Pengertian

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tmbooks, 2013).

Dalam Mardiasmo (2009), Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Kontribusi

Menurut (Halim2004:163) dalam jurnal Isfatul Fauziah, dkk.(2014) Kontribusi merupakan sumbangan atau sesuatu yang diberikan terhadap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak yang bisa dirasakan. Menurut (Handoko, 2013:3) dalam jurnal Irsandy dkk (2014) mengatakan bahwa analisis kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Efektivitas

Dalam Halim dan Kusufi (2012), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas

mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya.

Menurut Halim (2004:164) dalam jurnal Isfatul Fauziah dkk (2014), efektivitas mempunyai ukuran timbal balik antara target dan realisasi. Semakin besar realisasi yang diperoleh, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan tersebut. Adapun tingkat efektivitas penerimaan jenis pajak dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Jenis Pajak Daerah}} \times 100\%$$

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini data yang digunakan adalah berupa angka, oleh karena itu jenis penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel.

statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian (Noor, 2011). Dan dalam penelitian ini terdapat dua teknik yaitu analisis efektifitas dan analisis kontribusi. Masing-masing mempunyai rumus perhitungan sebagai berikut:

Analisis Efektivitas

Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penerimaan pajak daerah.

3.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Jenis Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui tingkat seberapa besar tingkat

kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

IV. ANALISIS DATA

4.1 Analisis Efektivitas

Penerimaan yang sangat efektif bila dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2015 angka realisasi yang diperoleh berada jauh dari target yang

ditetapkan. Penerimaan pajak restoran pada tahun ini mengalami penurunan dengan persentase sebesar 80,18 % dengan kriteria cukup efektif. Rata-rata persentase untuk efektivitas dari penerimaan pajak restoran adalah sebesar 89,36%.

Tabel 2.
Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandar Lampung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2011	18.000.000.000,00	13.500.286.358,00	75,00	Kurang Efektif
2012	20.000.000.000,00	17.284.202.625,21	86,42	Cukup Efektif
2013	21.000.000.002,00	20.543.727.774,60	97,83	Efektif
2014	21.999.999.997,80	23.623.276.215,00	107,38	Sangat Efektif
2015	34.999.999.997,80	28.063.550.715,00	80,18	Cukup Efektif
		Rata-rata	89,36	Cukup Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Tabel 3.
Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2011	8.850.442.000,00	10.464.084.252,00	118,23	Sangat Efektif
2012	10.221.724.192,00	10.530.259.469,56	103,02	Sangat Efektif
2013	15.000.000.160,00	12.206.819.008,50	81,38	Cukup Efektif
2014	16.000.000.000,00	16.020.176.880,00	100,13	Sangat Efektif
2015	20.000.000.000,00	15.243.130.946,00	76,22	Kurang Efektif
		Rata-rata	95,79	Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Pada tahun 2014 angka realisasi kembali naik dari tahun 2013 sebesar 100,13% dengan selisih 18,75% dengan kriteria sangat efektif. Akan tetapi realisasi yang di dapat pada tahun 2015 berada dibawah target dengan

persentase 76,22% dan mendapat kriteria kurang efektif. Secara keseluruhan penerimaan pajak hotel telah efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 95,79%.

Tabel 4.
Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kota Bandar Lampung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2011	4.000.000.000,00	1.377.022.670,00	34,43	Tidak Efektif
2012	4.400.000.000,00	2.136.797.400,00	48,56	Tidak Efektif
2013	5.364.247.192,00	2.527.275.700,00	47,11	Tidak Efektif
2014	5.369.360.000,00	3.034.574.324,00	56,52	Tidak Efektif
2015	6.369.360.000,00	3.146.510.364,00	49,40	Tidak Efektif
		Rata-rata	47,20	Tidak Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Untuk efektivitas keseluruhan dari pajak parkir, penerimaannya masih tidak efektif dalam lima tahun tersebut dengan rata-rata 47,20%.

Tabel 5.
Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Bandar Lampung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2011	200.000.000,00	246.117.125,00	123,06	Sangat Efektif
2012	420.000.000,00	632.542.625,00	150,61	Sangat Efektif
2013	982.980.000,00	1.237.789.951,00	125,92	Sangat Efektif
2014	1.282.140.000,00	1.300.987.035,00	101,47	Sangat Efektif
2015	1.982.140.000,00	1.611.525.781,50	81,30	Cukup Efektif
		Rata-rata	116,47	Sangat Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Rata-rata keseluruhan efektivitas dari penerimaan pajak di Kota Bandar Lampung telah sangat efektif dengan rata-rata yang diperoleh sebesar 116,47%.

Tabel 6.
Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandar Lampung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2011	3.000.000.000,00	3.048.834.184,00	101,63	Sangat Efektif
2012	3.693.098.000,00	4.381.068.935,61	118,63	Sangat Efektif
2013	7.199.999.464,00	5.794.133.258,08	80,47	Cukup Efektif
2014	7.700.000.000,00	6.962.370.443,00	90,42	Efektif
2015	8.500.000.000,00	8.569.424.087,00	100,82	Sangat Efektif
		Rata-rata	98,39	Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Penerimaan pajak hiburan di Kota Bandar Lampung telah efektif dilakukan dalam lima tahun tersebut, hal ini dapat dilihat berdasarkan rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 98,39%.

Tabel 7.
Efektivitas Penerimaan Reklame Kota Bandar Lampung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2011	8.000.000.000,00	6.315.626.735,00	78,95	Kurang Efektif
2012	11.000.000.000,00	14.462.490.287,00	131,48	Sangat Efektif
2013	22.000.000.000,00	16.763.497.818,00	76,20	Kurang Efektif
2014	16.000.000.000,00	16.532.446.411,00	103,33	Sangat Efektif
2015	20.500.000.000,00	17.920.008.753,00	87,41	Cukup Efektif
		Rata-rata	95,47	Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Penerimaan Pajak Reklame di Kota Bandar Lampung selama kurun waktu lima tahun tersebut telah efektif dilakukan, hal ini dapat dilihat berdasarkan rata-rata persentase yang diperoleh, yaitu sebesar 95,47%.

Tabel 8.
Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandar Lampung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2011	33.500.000.000,00	37.551.145.206,00	112,09	Sangat Efektif
2012	44.000.000.000,00	50.747.328.239,00	115,33	Sangat Efektif
2013	61.251.003.650,00	57.030.428.651,00	93,11	Efektif
2014	61.200.000.000,00	66.932.552.599,00	109,37	Sangat Efektif
2015	75.700.000.000,00	76.419.474.202,00	100,95	Sangat Efektif
Rata-rata			106,17	Sangat Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun tersebut secara keseluruhan telah sangat efektif, hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata persentase yang diperoleh yaitu sebesar 106,17%.

Tabel 9.
Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bandar Lampung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2011	484.000.000,00	810.265.921,00	167,41	Sangat Efektif
2012	580.800.000,00	622.978.705,00	107,26	Sangat Efektif
2013	517.860.000,00	771.175.216,00	148,92	Sangat Efektif
2014	717.860.000,00	701.695.250,00	97,75	Efektif
2015	517.860.000,00	515.434.250,00	99,53	Efektif
Rata-rata			124,17	Sangat Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Bandar Lampung telah sangat efektif. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan rata-rata yang diperoleh dalam kurun waktu lima tahun tersebut yaitu sebesar 124,17%.

Tabel 10.
Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Bandar Lampung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2011	-	-	-	-
2012	51.500.000.000,00	39.082.402.187,00	75,89	Kurang Efektif
2013	80.000.000.000,00	45.891.610.670,00	57,36	Tidak Efektif
2014	85.000.000.000,00	46.804.938.319,00	55,06	Tidak Efektif
2015	150.000.000.000,00	48.170.457.140,00	32,11	Tidak Efektif
Rata-rata			55,11	Tidak Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Selama lima tahun tersebut rata-rata yang diperoleh atas penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Bandar Lampung adalah sebesar 55,11%. Angka tersebut menerangkan bahwa penerimaan pajak yang dilakukan dalam tahun-tahun tersebut di atas tidak efektif.

Tabel 11.
Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Bandar Lampung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2011	28.200.000.000,00	39.288.758.264,00	139,32	Sangat Efektif
2012	37.500.000.000,00	43.556.504.817,88	116,15	Sangat Efektif
2013	58.199.999.838,00	79.756.445.254,00	137,04	Sangat Efektif
2014	75.150.000.002,00	64.245.501.486,95	85,49	Cukup Efektif
2015	125.150.000.002,00	58.795.146.107,50	46,98	Tidak Efektif
Rata-rata			105,00	Sangat Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Persentase efektivitas penerimaan pada tahun ini hanya sebesar 46,98%. Rata-rata yang diperoleh dalam kurun waktu lima tahun tersebut adalah sebesar 105,00%. Angka tersebut menerangkan bahwa penerimaan yang

dilakukan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandar Lampung telah sangat Efektif.

4.2 Analisis Kontribusi

Tabel 12.
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria Kontribusi
2011	13.500.286.358,00	162.772.590.331,88	8,29	Sangat Kurang
2012	17.284.202.625,21	298.696.062.085,29	5,79	Sangat Kurang
2013	20.543.727.774,60	367.151.254.980,88	5,60	Sangat Kurang
2014	23.623.276.215,00	394.637.483.196,59	5,99	Sangat Kurang
2015	28.063.550.715,00	397.547.326.856,39	7,06	Sangat Kurang
Rata-rata			6,54	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 8,29% sedangkan untuk kontribusi terendah terjadi

pada tahun anggaran 2013 dimana persentase yang diberikan hanya 5,60%.

Tabel 13.
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria Kontribusi
2011	10.464.084.252,00	162.772.590.331,88	6,43	Sangat Kurang
2012	10.530.259.469,56	298.696.062.085,29	3,53	Sangat Kurang
2013	12.206.819.008,50	367.151.254.980,88	3,32	Sangat Kurang
2014	16.020.176.880,00	394.637.483.196,59	4,06	Sangat Kurang
2015	15.243.130.946,00	397.547.326.856,39	3,83	Sangat Kurang
Rata-rata			4,23	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Dari persentase tersebut dapat diketahui juga bahwa kontribusi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun tersebut terjadi pada

tahun 2011. Dan kontribusi pajak hotel terendah terjadi pada tahun 2013.

Tabel 14.
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria Kontribusi
2011	1.377.022.670,00	162.772.590.331,88	0,85	Sangat Kurang
2012	2.136.797.400,00	298.696.062.085,29	0,72	Sangat Kurang
2013	2.527.275.700,00	367.151.254.980,88	0,69	Sangat Kurang
2014	3.034.574.324,00	394.637.483.196,59	0,77	Sangat Kurang
2015	3.146.510.364,00	397.547.326.856,39	0,79	Sangat Kurang
Rata-rata			0,76	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Dari persentase tersebut, dapat dilihat bahwa kontribusi tertinggi terjadi pada tahun

2011 dan untuk kontribusi terendah terjadi pada tahun 2013.

Tabel 15.
Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Air Tanah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria Kontribusi
2011	246.117.125,00	162.772.590.331,88	0,15	Sangat Kurang
2012	632.542.625,00	298.696.062.085,29	0,21	Sangat Kurang
2013	1.237.789.951,00	367.151.254.980,88	0,34	Sangat Kurang
2014	1.300.987.035,00	394.637.483.196,59	0,33	Sangat Kurang
2015	1.611.525.781,50	397.547.326.856,39	0,41	Sangat Kurang
Rata-rata			0,29	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Dari persentase tersebut, dapat diketahui bahwa kontribusi tertinggi terjadi pada

tahun anggaran 2015 dan kontribusi terendah terjadi pada tahun anggaran 2011.

Tabel 16.
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria Kontribusi
2011	3.048.834.184,00	162.772.590.331,88	1,87	Sangat Kurang
2012	4.381.068.935,61	298.696.062.085,29	1,47	Sangat Kurang
2013	5.794.133.258,08	367.151.254.980,88	1,58	Sangat Kurang
2014	6.962.370.443,00	394.637.483.196,59	1,76	Sangat Kurang
2015	8.569.424.087,00	397.547.326.856,39	2,16	Sangat Kurang
Rata-rata			1,77	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Dari perolehan persentase tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan yang tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2015

dan kontribusi terendah terjadi pada tahun anggaran 2012.

Tabel 17.
Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria Kontribusi
2011	6.315.626.735,00	162.772.590.331,88	3,88	Sangat Kurang
2012	14.462.490.287,00	298.696.062.085,29	4,84	Sangat Kurang
2013	16.763.497.818,00	367.151.254.980,88	4,57	Sangat Kurang
2014	16.532.446.411,00	394.637.483.196,59	4,19	Sangat Kurang
2015	17.920.008.753,00	397.547.326.856,39	4,51	Sangat Kurang
Rata-rata			4,40	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Kontribusi pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun 2012 dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2011.

Tabel 18.
Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria Kontribusi
2011	37.551.145.206,00	162.772.590.331,88	23,07	Sedang
2012	50.747.328.239,00	298.696.062.085,29	16,99	Kurang
2013	57.030.428.651,00	367.151.254.980,88	15,53	Kurang
2014	66.932.552.599,00	394.637.483.196,59	16,96	Kurang
2015	76.419.474.202,00	397.547.326.856,39	19,22	Kurang
Rata-rata			18,36	Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Kontribusi pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2011 dan kontribusi terendah terjadi pada tahun anggaran 2013.

Tabel 19.
Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp)	Realisasi PAD (%)	Persentase (%)	Kriteria Kontribusi
2011	810.265.921,00	162.772.590.331,88	0,50	Sangat Kurang
2012	622.978.705,00	298.696.062.085,29	0,21	Sangat Kurang
2013	771.175.216,00	367.151.254.980,88	0,21	Sangat Kurang
2014	701.695.250,00	394.637.483.196,59	0,18	Sangat Kurang
2015	515.434.250,00	397.547.326.856,39	0,13	Sangat Kurang
Rata-rata			0,24	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Dari kelima tahun tersebut, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2011 sedangkan untuk kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015.

Tabel 20.
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria Kontribusi
2011	-	162.772.590.331,88	0,00	Sangat Kurang
2012	39.082.402.187,00	298.696.062.085,29	13,08	Kurang
2013	45.891.610.670,00	367.151.254.980,88	12,50	Kurang
2014	46.804.938.319,00	394.637.483.196,59	11,86	Kurang
2015	48.170.457.140,00	397.547.326.856,39	12,12	Kurang
Rata-rata			9,91	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Dari data tersebut, kontribusi tertinggi diberikan pada tahun anggaran 2012 dan kontribusi terendah diberikan pada tahun 2014.

Tabel 21.
Kontribusi BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah

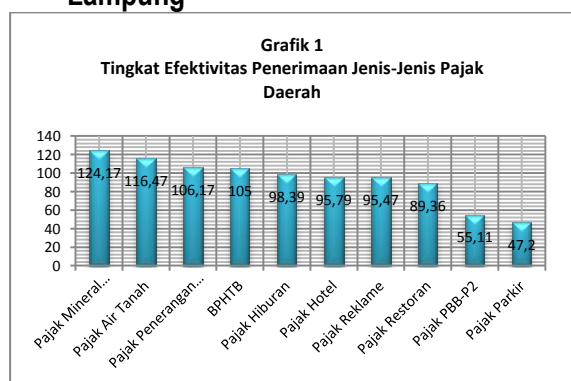
Tahun	Realisasi BPHTB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria Kontribusi
2011	39.288.758.264,00	162.772.590.331,88	24,14	Sedang
2012	43.556.504.817,88	298.696.062.085,29	14,58	Kurang
2013	79.756.445.254,00	367.151.254.980,88	21,72	Sedang
2014	64.245.501.486,95	394.637.483.196,59	16,28	Kurang
2015	58.795.146.107,50	397.547.326.856,39	14,79	Kurang
Rata-rata			18,30	Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)

Dari data tersebut, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2012.

4.3 Hasil Penelitian

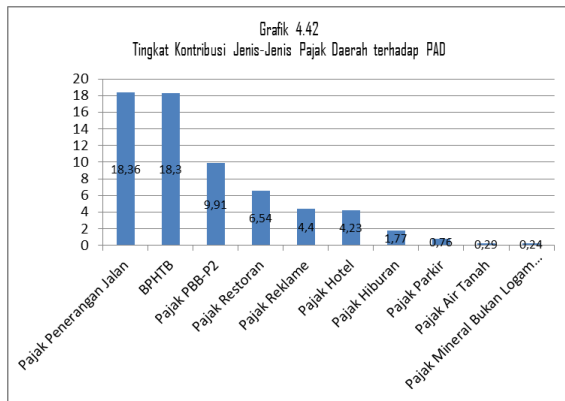
a. Perbandingan tingkat efektivitas jenis-jenis Pajak Daerah Kota Bandar Lampung



Berdasarkan grafik 1 di samping, efektivitas penerimaan masing-masing pajak daerah pada tahun anggaran 2011-2015 sangat bervariasi. Hal tersebut dilihat berdasarkan rata-rata persentase yang diberikan dalam kurun waktu lima tahun tersebut.

b. Perbandingan Tingkat Kontribusi Jenis-Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Bandar Lampung

Berdasarkan grafik 2 di bawah, untuk kontribusi yang diberikan oleh masing-masing jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung dari tahun 2011-2015 masuk dalam kriteria kurang hingga sangat kurang dengan persentase yang berkisar dari 0,00% hingga 20,00%.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Efektivitas penerimaan masing-masing pajak daerah pada tahun anggaran 2011-2015 sangat bervariasi. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan atas masing-masing jenis pajak daerah yang efektivitasnya tertinggi diberikan oleh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sedangkan untuk penerimaan yang efektivitasnya terendah diberikan oleh Pajak Parkir.
2. Untuk kontribusi yang diberikan oleh masing-masing jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung dari tahun 2011-2015 masuk dalam kriteria kurang hingga sangat kurang dengan persentase yang berkisar dari 0,00% hingga 20,00%. Berdasarkan hasil perolehan rata-rata kontribusi masing-masing jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung, yang memberikan kontribusi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun tersebut adalah Pajak Penerangan jalan. Sedangkan untuk kontribusi terendah diberikan oleh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

5.1 Saran

1. Agar lebih fokus mengukur serta menyesuaikan tingkat kemampuan daerah secara akurat mengenai penetapan target dengan realisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya mengenai Pajak Daerah sehingga penerimaan Pajak Daerah dapat diperoleh dengan maksimal.

2. Lebih optimal lagi dalam mengintensifkasi dan mengekstensifikasi Pajak Daerah khususnya untuk jenis pajak daerah yang penerimaannya masih tergolong rendah, agar dapat lebih lagi menjadi sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai urusan rumah tangga daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arditia, Reza. 2013. *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Diakses pada tanggal 19 Maret 2017 dari <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/4068/57/article.pdf>
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2016*. Bandar Lampung
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Gorontalo: INDEKS.
- Fauziah, Isfatul; Husaini, Achmad dan Shobaruddin, M. 2014. *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang*. *Jurnal Perpajakan*. Volume 3, Nomor 1 Desember 2014. Diakses pada tanggal 19 Maret 2017 dari <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/70>
- Halim, Abdul, Kusufi dan Syam. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imam Soebechi. 2012. *JUDICIAL REVIEW Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Jakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI

- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Mosal, Mourin M. 2013. *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado*. Volume.1 No.4 Desember 2013. Halaman 374-382. Diakses pada tanggal 19 Maret 2017 dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emb/article/view/2699>
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Octovida, Irsandy; Sudjana, Nengah dan Azizah, Devi Farah. 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Volume 15, Nomor 1 Oktober 2014. Diakses pada tanggal 19 Maret 2017 dari <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/621>
- Samudra, Azhari A. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Tmbooks. 2013. *Perpajakan-Esensi dan Aplikasi*. Sleman: Penerbit ANDI.
- Widjaja, H.A.W. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.